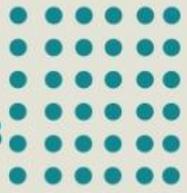


Katalog : 3205005.3308  
ISSN : 2776-7116



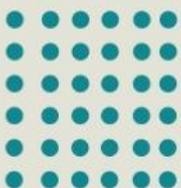
# KEMISKINAN

# DAN POLA KONSUMSI

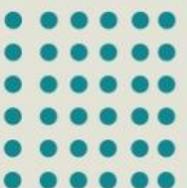
## PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG

Volume : 8, 2024

2023



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG



Katalog : 3205005.3308

ISSN : 2776-7116

# KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG

Volume : 8, 2024

**2023**

<https://magelangkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG

**Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk  
Kabupaten Magelang 2023 volume 8**

ISSN : 2776-7116  
No Publikasi : 33080.24011  
Katalog : 3205005.3308

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 45 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Desain Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Penerbit:**

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Sumber Ilustrasi:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



## **TIM PENYUSUN**

**Penanggung jawab :**

**Toto Desanto, S.Si, M.Si**

**Penyunting :**

**Diana Larasati, S.Si, MM**

**Penulis :**

**Fetia Nursih Handayani, SP**

**Pengolah data :**

**BPS RI**

**Pembuat Infografis :**

**Joko Prasetyo, S.ST, M.Si**

<https://magelangkab.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pengentasan kemiskinan harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan serta data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk.

Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menerbitkan publikasi data kemiskinan dan pola konsumsi penduduk menurut jenis konsumsinya untuk memberi gambaran tentang tingkat kemiskinan makro dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang. Penerbitan publikasi ini guna memenuhi sebagian kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat luas akan data dan informasi yang semakin beragam.

Publikasi Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2023 tidak hanya memuat data tahun 2023 tetapi juga dalam beberapa tabel disajikan series data beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun pada bulan Maret.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kota Mungkid, Juni 2024  
Kepala Badan Pusat statistik  
Kabupaten Magelang



TOTO DESANTO, S.Si, M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
1 Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Sistematika Penyajian.....	4
2 Metodologi .....	7
2.1 Sumber Data.....	6
2.2 Konsep dan Definisi Kemiskinan.....	6
2.3 Penyebab Kemiskinan.....	7
2.4 Pengukuran Kemiskinan.....	8
2.4.1 Perhitungan Indikator Kemiskinan Provinsi.....	9
2.4.2 Perhitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	9
2.5 Desain Pengukuran.....	11
2.6 Konsep dan Definisi Secara Umum .....	13
3 Analisis Kemiskinan.....	17
3.1 Kondisi Kemiskinan .....	19
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023.....	19
3.1.2 Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2014-2023.....	19
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2014-2023.....	22
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin.....	25
3.2.1 Pendidikan.....	25
3.2.2 Ketenagakerjaan.....	28
3.2.3 Fasilitas Perumahan.....	31
4 Pola Konsumsi Penduduk .....	33
4.1 Rata-rata Pengeluaran Penduduk.....	33
4.2 Pola Konsumsi Penduduk.....	34
4.2.1 Pola Konsumsi Makanan.....	35

4.2.2	Pola Konsumsi Non Makanan.....	36
4.3	Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	38
4.4	Pola Konsumsi Kalori Penduduk.....	41
4.5	Pola Konsumsi Protein Penduduk.....	42
5	Penutup .....	45

<https://magelangkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2023.....	24
Tabel 4.1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2017-2023.....	34
Tabel 4.3.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2023.....	41
Tabel 4.4.	Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Penduduk (Kkal), Tahun 2023.....	42
Tabel 4.5.	Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Gram), Tahun 2023.....	43

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1.1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023.....	20
Gambar 3.1.1.2	Persentase Penduduk Miskin Wilayah eks-Keresidenan Kedu Tahun 2023 .....	21
Gambar 3.1.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023 .....	22
Gambar 3.1.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023.....	23
Gambar 3.2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022-2023 .....	26
Gambar 3.2.1.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7-15 Tahun Tahun 2022-2023.....	28
Gambar 3.2.2.1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2022-2023.....	29
Gambar 3.2.2.2.	Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2021-2023.....	30
Gambar 3.2.3	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2022-2023.....	32
Gambar 4.1.	Perkembangan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2018-2023 .....	35
Gambar 4.2.1.	Pola Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2023.....	36
Gambar 4.2.2.	Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Kelompok Komoditas 2023.....	37
Gambar 4.3.	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran Penduduk, Tahun 2023.....	39



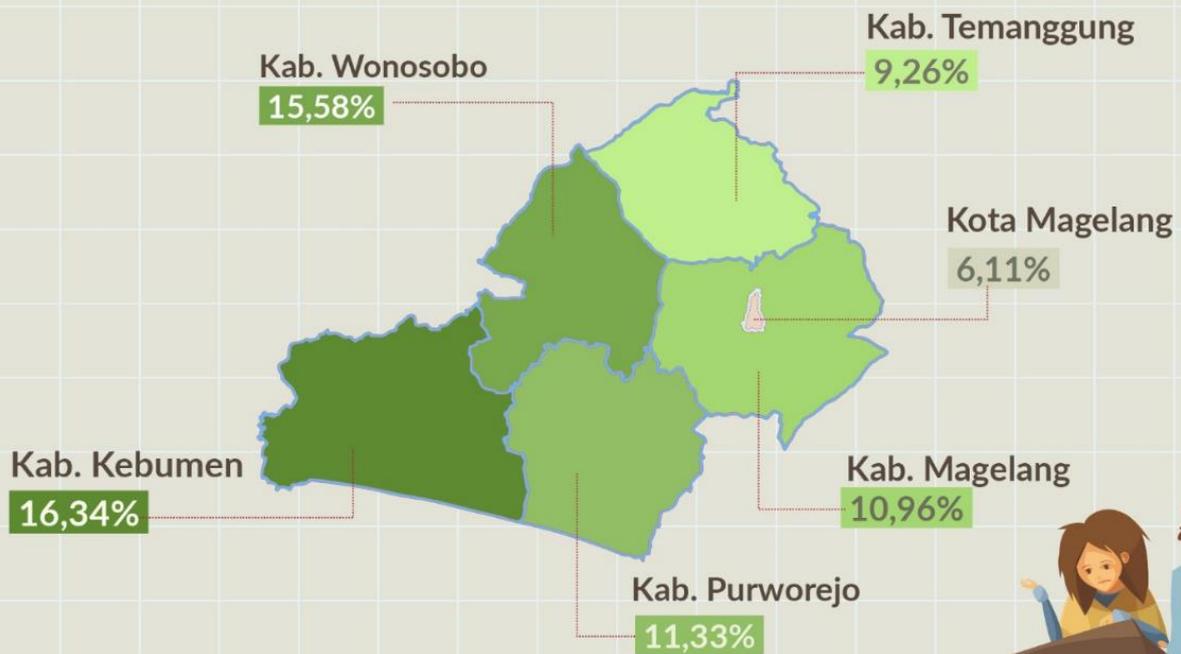


# KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG 2023

Jumlah (Ribuan Orang) dan Persentase Penduduk Miskin 2012-2023



Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Keresidenan Kedu 2023





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, strategi pengurangan tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik harus merupakan data kemiskinan yang dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu angka kemiskinan baru dihitung secara nasional. Kemudian mulai Tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin mulai disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Baru pada Tahun 2002, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas. Pada awalnya data kemiskinan dihitung 3 tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Susenas Modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun, mulai tahun 2012 sampai 2014 dilakukan penghitungan kemiskinan setiap tahun dengan pelaksanaan Susenas Modul Konsumsi triwulanan. Sejak tahun 2015 penghitungan angka kemiskinan didasarkan pada hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dilakukan setiap bulan Maret.

Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh

seluruh rakyat berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk:

Berkaitan dengan hal-hal diatas dan untuk menjawab kebutuhan data perlu disusun publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2023” yang memuat data dan informasi tentang kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang.

## 1.2. Tujuan

Secara spesifik penerbitan publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2023” ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- i. perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2014-2023
- ii. perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023
- iii. perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023
- iv. karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2023
- v. program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun 2021-2023
- vi. gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2023.
- vii. gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan pola konsumsi penduduknya.

## 1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:  
Bab satu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab dua berisi metodologi yang berisi sumber data, konsep dan definisi, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan.

Bab tiga berisi tentang analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program bantuan pengentasan kemiskinan.

Bab empat berisi analisis pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan pengaruh pola konsumsi penduduk

<https://magelangkab.bps.go.id>



## BAB 2 METODOLOGI

### 2.1. Sumber Data

Angka Kemiskinan dan Pola Konsumsi penduduk Tahun 2023 di Kabupaten Magelang dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015). Pengumpulan data rumah tangga diperoleh dari hasil wawancara langsung antara pencacah dan responden yang mewakili rumah tangga bersangkutan

### 2.2. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi

pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan obyektif and subyektif, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

### 2.3. Penyebab Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);

6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

#### 2.4. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kilokalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1,25 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan makro menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk. Konsep yang digunakan adalah dengan konsep moneter bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan dalam pendekatan pengeluaran rumah tangga (Jousairi Hasbullah). Metode yang dipakai BPS ini juga dipakai 50 persen negara berkembang dari 84 negara berkembang menurut inventarisasi dari *United Nation Statistic Division*.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Konsumsi.

### 2.4.1. Perhitungan Indikator Kemiskinan Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKDD 2004). SPKDD 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas konsumsi pengeluaran.

GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya dihitung indikator kemiskinan tingkat provinsi.

### 2.4.2. Perhitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota

Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota dan estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1}x(1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana:

$GKS_{ij}^t$  = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j tahun t

$GK_{ij}^{t-1}$  = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j tahun t-1

$E_j$  = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

$I_{ij}$  = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-idigunakan elastisitas provinsi ke-j di level perdesaan.
  - Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-idigunakan elastisitas provinsi ke-j di level perkotaan.
  - Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*)
2. Menentukan P0 sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P0 provinsi ke-j periode tke t-1 dengan P0 kabupaten ke-ipada tahun t-1.
  3. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P0 sementara.
  4. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index (HCI-P<sub>0</sub>)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>i</sub>*) yang merupakan ukuran

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P<sub>2</sub>*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), jika  $\alpha=1$  diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>1</sub>*) dan jika  $\alpha=2$  disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P<sub>2</sub>*).

## 2.5. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Melalui kegiatan Susenas, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga

perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

#### **A. Konsumsi makanan, meliputi :**

1. Konsumsi padi-padian (beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

#### **B. Konsumsi non makanan, meliputi :**

1. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)
2. Aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya).
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.

6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

## **2.6. Konsep dan Definisi Secara Umum**

### **Rumah Tangga**

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu.

### **Anggota rumah tangga/ Penduduk**

Anggota Rumah Tangga (ART) / penduduk adalah orang yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga, baik yang berada didalam rumah tangga saat pencacahan maupun yang sementara sedang tidak ada. Orang yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap ditempat lain/pindah tidak termasuk ART. Dan orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap dianggap sebagai ART.

### **Pengeluaran**

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan pesta dan upacara). Konsumsi yang dimasukkan disini tidak memperhatikan asal barang atau jasa, jadi baik dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga

semua dimasukkan dalam pencacahan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang digunakan rumah tangga lain atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan dalam pencacahan konsumsi rumah tangga.

### **Pendapatan**

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Dalam kenyataan dilapangan, informasi tentang pendapatan tidak seperti yang diharapkan karena banyak responden cenderung menyembunyikan informasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

### **Pendidikan**

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah

### **Ketenagakerjaan**

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

Bekerja di kegiatan informal adalah penduduk miskin yang mempunyai

status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Bekerja di kegiatan formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

### **Pengeluaran Per Kapita Untuk Makanan**

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan).

### **Fasilitas Perumahan**

Air terlindung adalah leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah  $\geq 10$  meter.

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

### **Program Pemerintah Penanggulangan Kemiskinan**

Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang. BPNT dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) karena dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari BPNT, yaitu :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI).
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.



## **BAB 3**

### **ANALISIS KEMISKINAN**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, dalam RPJMN 2020 - 2024, strategi pengurangan tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

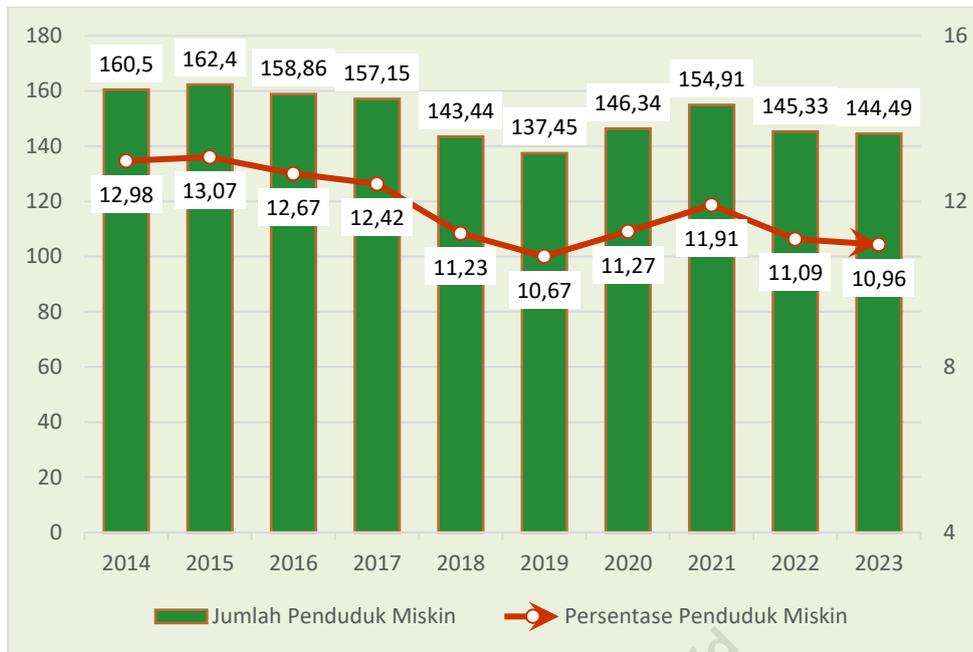
Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

### **3.1. Kondisi Kemiskinan**

#### **3.1.1. Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023**

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2013-2023 ditunjukkan pada Gambar 3.1.1. Secara umum, pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2014-2015 dan tahun 2019-2021. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 144,49 ribu jiwa (10,96 persen), turun dibanding tahun 2022 yang sebesar 145,33 ribu jiwa (11,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 0,13 persen poin atau sebanyak 840 ribu jiwa.

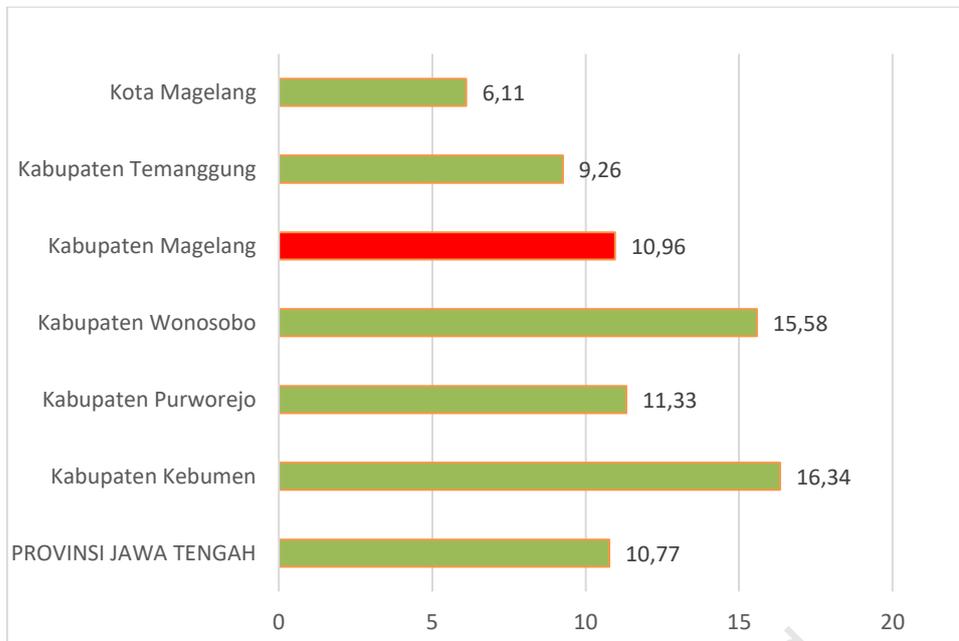


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Gambar 3.1.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2023**

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,67 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,07 persen. Dalam rentang kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah berhasil mengentaskan 16,01 ribu penduduk miskin, dengan nilai yang berfluktuasi di tiap tahunnya.

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Di wilayah eks-Keresidenan Kedu, Kota Magelang memiliki persentase penduduk miskin terendah sebesar 6,11 persen, dilanjutkan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang berturut-turut sebesar 9,26 persen dan 10,96 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 16,34 persen lebih dari dua kali lipat persentase penduduk miskin di Kota Magelang.



Sumber : Susenas Maret 2023

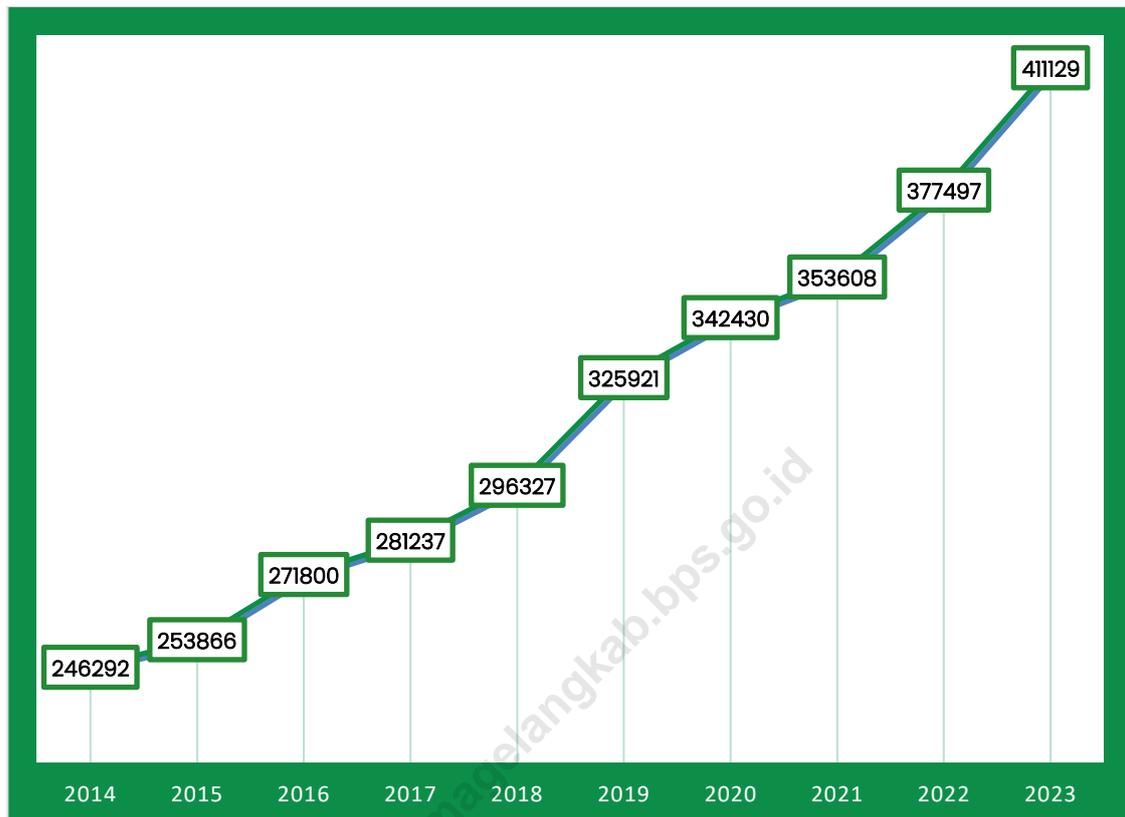
Gambar 3.1.1.2. Persentase Penduduk Miskin Wilayah eks-Karesidenan Kedu Tahun 2023

### 3.1.2. Garis Kemiskinan Tahun 2014–2023

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara 2 100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 3.1.2.

Garis kemiskinan Kabupaten Magelang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, garis kemiskinan meningkat sekitar Rp. 164 837,-. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Magelang meningkat sebesar Rp 33 632,- atau naik 8,91 persen dari tahun 2022, yaitu dari Rp. 377 497,- menjadi Rp. 411 129,- per kapita per bulan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kenaikan harga barang-

barang yang dikonsumsi yang berakibat pada naiknya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.1.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2023

### 3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2014-2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio* ( $P_0$ ) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*,  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*,  $P_2$ ). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai

suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur hal tersebut yaitu dengan tingkat keparahan kemiskinan.

Penurunan pada  $P_1$  mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada  $P_2$  mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan atau dengan kata lain distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2023

Selama periode sepuluh tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Kabupaten Magelang menunjukkan angka yang berfluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan berkisar antara 0,98 sampai 2,07. Akan tetapi selama empat tahun terakhir terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan yaitu dari kondisi terendah 1,23 pada tahun 2020 menjadi 1,73 pada tahun 2023 atau meningkat sekitar 0,5. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin menjauhi garis kemiskinan, yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk mengalami penurunan.

**Tabel 3.1.3.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) serta Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )**  
**Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2014 – 2023**

No	Tahun	$P_1$ (Kedalaman Kemiskinan)		$P_2$ (Keparahan Kemiskinan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2014	2,07	2,25	0,47	0,56
2	2015	1,60	2,44	0,32	0,65
3	2016	1,84	2,37	0,44	0,63
4	2017	1,67	2,21	0,31	0,57
5	2018	1,55	1,85	0,34	0,45
6	2019	0,98	1,53	0,17	0,30
7	2020	1,23	1,72	0,20	0,34
8	2021	1,63	1,91	0,35	0,45
9	2022	1,66	1,77	0,41	0,42
10	2023	1,73	1,75	0,41	0,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Selama periode sepuluh tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan memiliki angka yang relatif stabil berkisar 0,17 sampai 0,47. Kondisi yang sama dengan indeks kedalaman, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,2 meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 0,21 poin. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks keparahan kemiskinan sama yaitu 0,41.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kabupaten Magelang relatif lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata kesejahteraan antara penduduk miskin di Kabupaten Magelang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

## 3.2. Karakteristik Penduduk Miskin

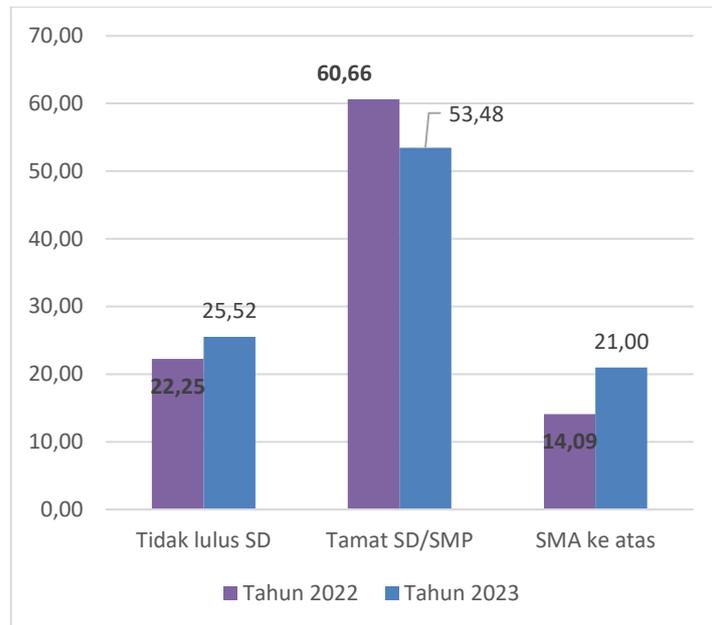
### 3.2.1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya berguna dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk dalam usaha untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah, pembangunan dalam bidang pendidikan juga untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi ketimpangan pendapatan dan akhirnya mengentaskan masalah kemiskinan.

Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan. Dengan kondisi ini, kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Program tersebut diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dengan program tersebut untuk tingkat pendidikan dasar negeri (setingkat SD dan SMP) bisa digratiskan dalam biaya bulanan. Bahkan Bantuan Operasional Sekolah sudah bertambah sampai ke jenjang SMA di tahun 2022. Selain itu ada program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin serta Program Keluarga Harapan. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat gambaran pendidikan antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.



Sumber : Susenas Maret, 2022-2023

**Gambar 3.2.1.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022 – 2023**

Gambaran tingkat pendidikan penduduk miskin umur 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2022-2023 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh penduduk miskin berpendidikan Tamat SD/SMP, urutan kedua untuk kelompok penduduk miskin yang tidak berpendidikan adalah Tidak Lulus SD dan yang paling sedikit adalah kelompok pendidikan SMA keatas. Selama periode 2022-2023, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD dan SMP sebanyak 60,66 persen di tahun 2022 dan 53,48 persen di tahun 2023. Pada tahun 2023, ada penurunan penduduk miskin tamat SD/SMP sebesar 7,18 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penduduk miskin dengan pendidikan SMA ke atas terjadi peningkatan sebesar 6,91 persen poin dari tahun 2023. Untuk penduduk miskin berpendidikan Tidak Lulus SD, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,27 persen poin.

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis minimal dalam satu kalimat sederhana. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (huruf jawa,

kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Membaca dan menulis disini tidak harus huruf latin, namun juga bisa huruf hijaiyah, atau huruf lainnya misal aksara jawa atau huruf kanji. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia pendidikan yaitu di umur 15 – 24 tahun dari hasil Susenas Maret 2022 yaitu 100 persen, artinya semua penduduk miskin usia 15-24 tahun sudah bisa membaca huruf latin dan huruf lainnya. Untuk kelompok umur 15 – 55 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,54 persen poin dari tahun 2021.

Kemampuan membaca dan menulis penting bagi kehidupan manusia karena melalui tulisan banyak ilmu dan pengetahuan yang akan diperoleh. Pengetahuan yang tepat dan sesuai akan membuka wawasan sehingga memberi banyak alternatif pilihan dalam hidup yang diharapkan akan memperbaiki cara hidup dan kemampuan bertahan hidup, bahkan mungkin untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi dan melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan ini memasukkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A, Paket B dan Paket C.



Sumber : Susenas Maret, 2022-2023

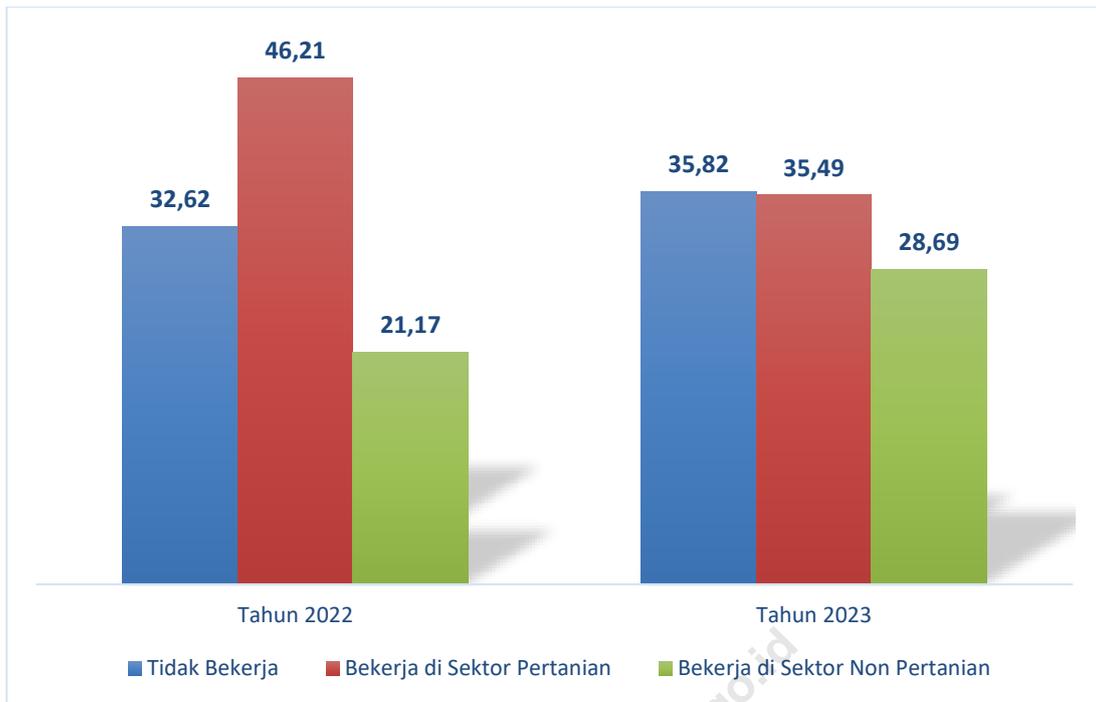
**Gambar 3.2.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7 – 15 Tahun Tahun 2022-2023**

Dari Hasil Susenas, APS penduduk miskin kelompok umur 7–12 tahun dan kelompok umur 13–15 tahun sudah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semua penduduk miskin yang berumur 7 – 12 Tahun dan 13 – 15 tahun masih bersekolah.

### 3.2.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggotarumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing.

Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir



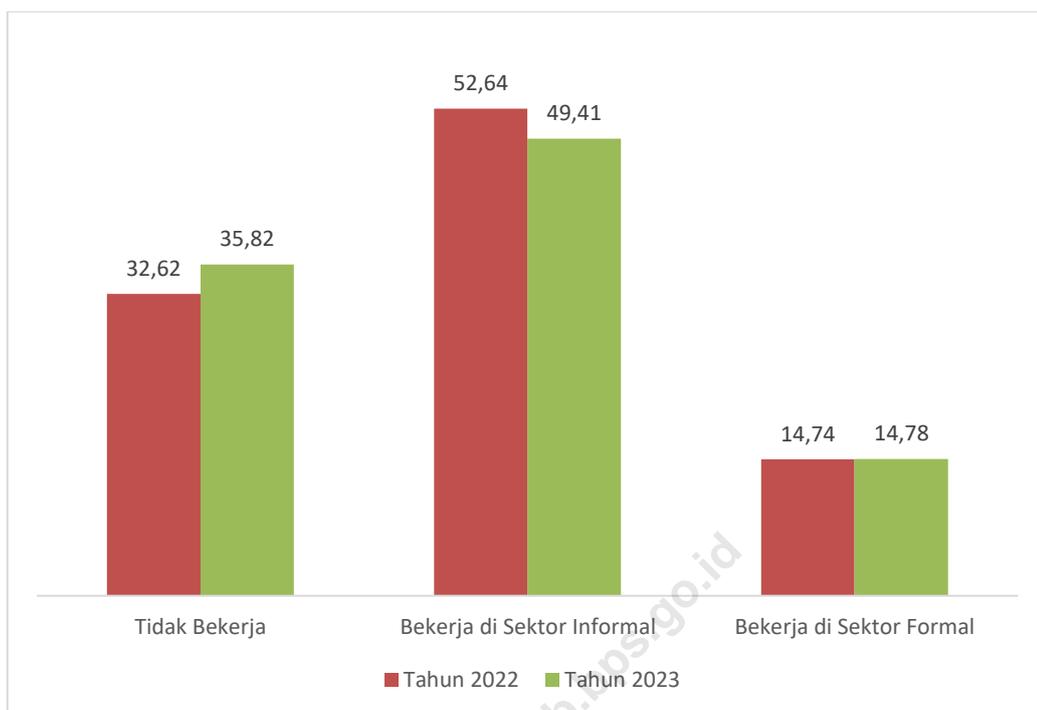
Sumber : Susenas Maret, 2022–2023

**Gambar 3.2.2.1.. Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2022–2023**

Dari hasil pendataan Susenas, persentase penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2023 sebesar sebesar 35,82 persen yaitu meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 32,62 persen. Sementara itu , jumlah penduduk miskin yang bekerja di dominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 35,49 persen di tahun 2023, turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 46,21 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian ada peningkatan yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar 21,17 persen menjadi sebesar 28,69 persen di tahun 2023.

Karakteristik penduduk miskin dilihat dari sisi ketenagakerjaan yang lain adalah status pekerjaan, yaitu penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang status kedudukan dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan

pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.



Sumber : Susenas Maret, 2022 – 2023

**Gambar 3.2.2.2. Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2022-2023**

Persentase penduduk miskin umur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2022-2023 ditunjukkan pada Gambar 3.2.2.2. Dilihat dari grafik diatas, selama tahun 2022-2023, penduduk miskin di Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin cenderung mempunyai pekerjaan yang tidak tetap/pekerja bebas atau pekerjaan yang belum mapan sehingga sangat berpengaruh dalam kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 2023, penduduk miskin umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang bekerja di sektor informal yaitu sebanyak 49,41 persen turun sebesar 3,23 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan tahun 2022.

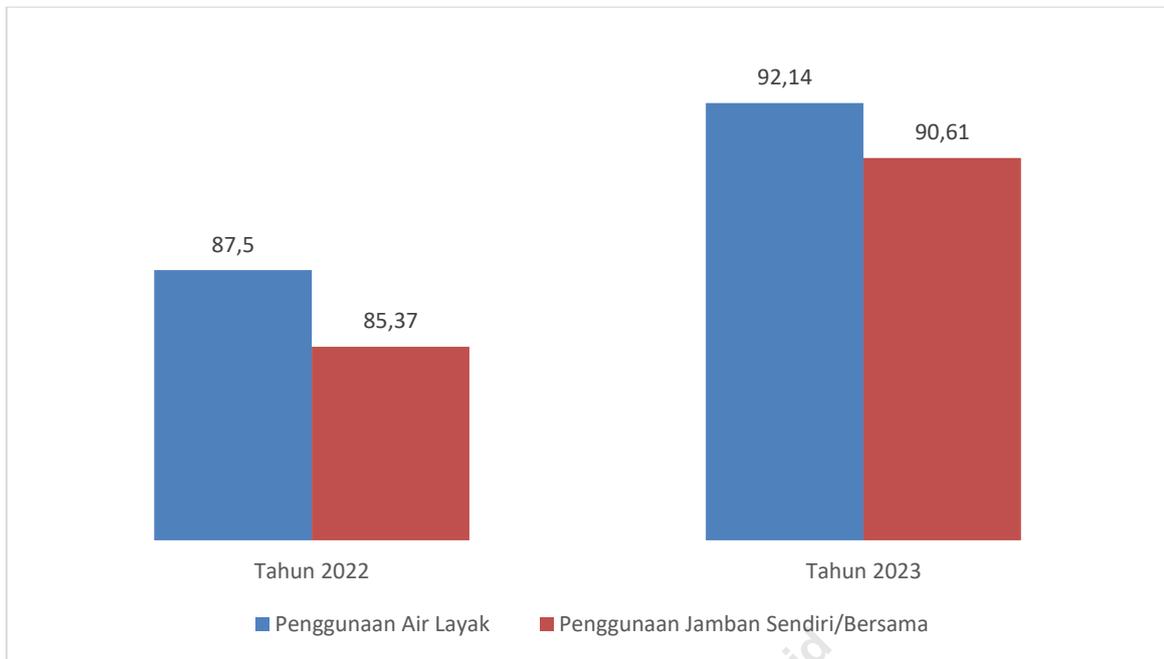
### 3.2.3 Fasilitas Perumahan

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tinggal mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tingkat kesehatan tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang tinggal didalamnya. Ketersediaan air bersih terutama untuk fasilitas air minum dan fasilitas jamban yang dimiliki rumah tangga bisa dijadikan indikator untuk menunjukkan rumah sehat.

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk sumber air minum penduduk miskin menunjukkan nilai yang cukup baik. Pembangunan dalam bidang sanitasi yang menjadi perhatian pemerintah membuat fasilitas tersebut bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi dan yang menggunakan jamban sendiri/bersama selama periode 2022-2023 dapat ditunjukkan pada gambar 3.2.3.

Rumah tangga pengguna air layak yang dimaksud disini adalah air minum yang sumbernya dari air terlindung yaitu ledeng meteran, ledeng eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran atau limbah lebih dari 10 meter atau air minum yang sumbernya dari air terlindung namun jarak ke penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 m atau air tidak terlindung tapi sumber untuk mandi/cuci dan lain-lain dari air terlindung.

Pada periode 2022-2023 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi yaitu dari 87,5 persen pada tahun 2022 menjadi 92,14 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan sarana dan prasarana air bersih layak konsumsi yang dinikmati oleh penduduk miskin di Kabupaten Magelang.



Sumber : Susenas Maret, 2022-2023

**Gambar 3.2.3.**

**Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2022-2023**

Selain itu, ketersediaan jamban menjadi salah satu indikator dalam melihat baik buruknya fasilitas perumahan. Selain ketersediaan jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga melihat ketersediaan jamban tersebut milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan tidak tersedianya fasilitas jamban. Pada tahun 2023, penggunaan jamban sendiri atau bersama penduduk miskin sedikit mengalami peningkatan sebesar 5,24 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

## BAB 4

### POLA KONSUMSI PENDUDUK

#### 4.1. Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Keadaan ekonomi rumah tangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumah tangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Tabel 4.1 menyajikan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017-2023. Secara umum, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan dan non makanan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya konsumsi penduduk yang dipengaruhi oleh kuantitas konsumsi dan inflasi. Dalam tujuh tahun terakhir, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan meningkat dari Rp.653 538,- di tahun 2017 menjadi Rp 1 043 103,- di tahun 2023 . Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 323 814,- dalam tujuh tahun terakhir meningkat lebih dari dua ratus ribu rupiah, yaitu menjadi Rp. 526 545,- pada tahun 2023. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok

non makanan tahun 2017 sebesar Rp. 329 724,- dalam tujuh tahun terakhir meningkat lebih dari seratus delapan puluh ribu rupiah yaitu menjadi Rp. 516 558,- pada tahun 2023.

**Tabel 4.1.**  
**Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan Tahun 2017-2023 (Rp)**

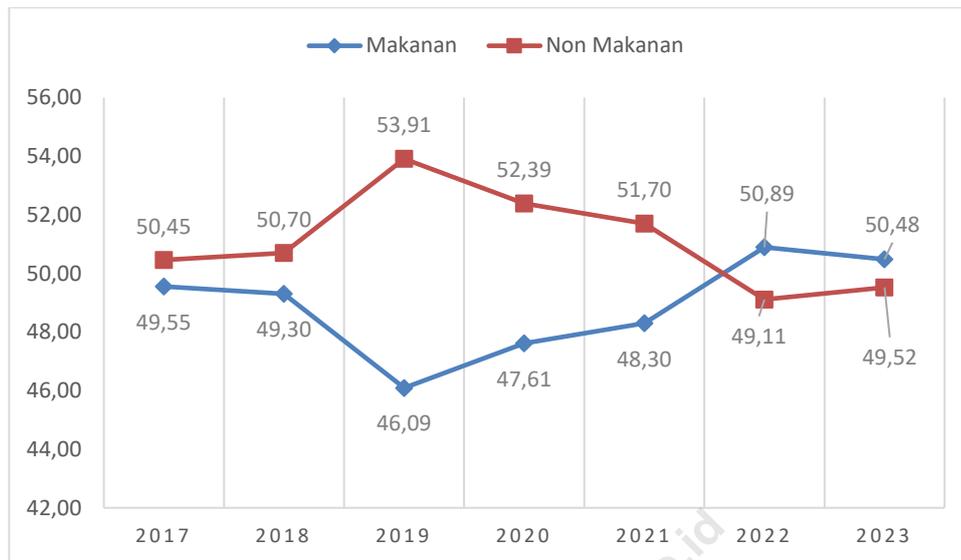
Tahun	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	1 043 103	526 545	516 558
2022	930 609	473 596	457 014
2021	947 904	457 815	490 089
2020	911 250	433 844	477 407
2019	887 835	409 228	478 607
2018	799 654	394 239	405 415
2017	653 538	323 814	329 724

Sumber : Susenas Maret, 2017-2023

#### 4.2. Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Seiring dengan kenaikan pendapatan, persentase untuk pengeluaran makanan akan berkurang, tergantikan oleh pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan energi.



Sumber : Susenas Maret 2017-202

**Gambar 4.1. Perkembangan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2017-2022**

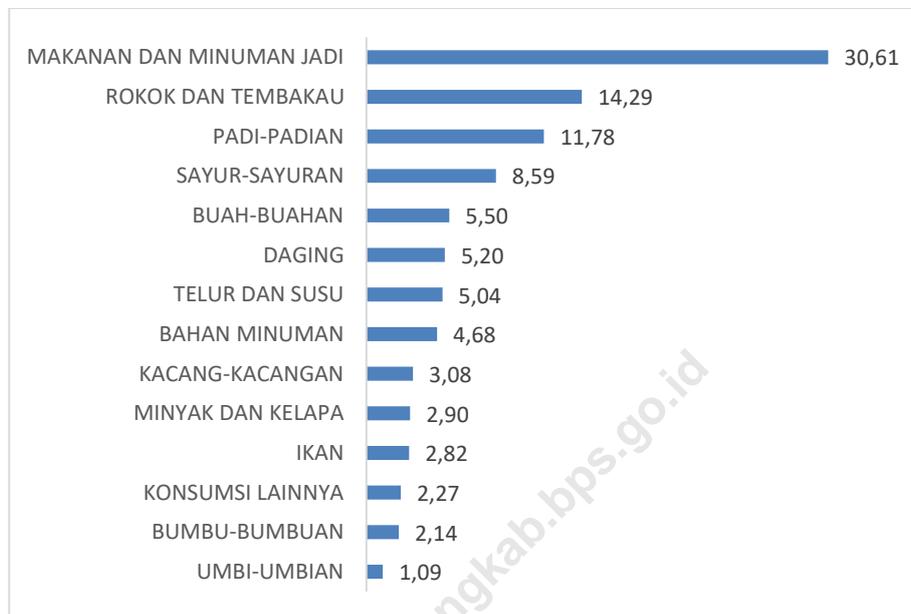
Gambaran perkembangan pola konsumsi rumah tangga Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2023 tersaji dalam Gambar 4.1. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, konsumsi non makanan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi makanan dengan nilai yang berfluktuasi setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2022, terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk kabupaten Magelang, dimana konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non makanan.

Komposisi pengeluaran makanan pada tahun 2023 sebesar 50,48 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 50,89 persen. Sementara pengeluaran untuk Non Makanan mengalami peningkatan dari 49,11 persen di tahun 2022 menjadi 49,52 persen di tahun 2023. Kondisi ini menjelaskan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk miskin untuk mengurangi konsumsi dari non makanan ke kebutuhan makanan.

#### 4.2.1 Pola Konsumsi Makanan

Pengeluaran kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk bahan makanan yang berupa padi-padian, umbi, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lainnya, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, dan pengeluaran untuk rokok

dan tembakau. Rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok komoditas makanan per kapita sebulan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran seluruh komoditas makanan didapatkan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan.



Sumber : Susenas Maret 2023

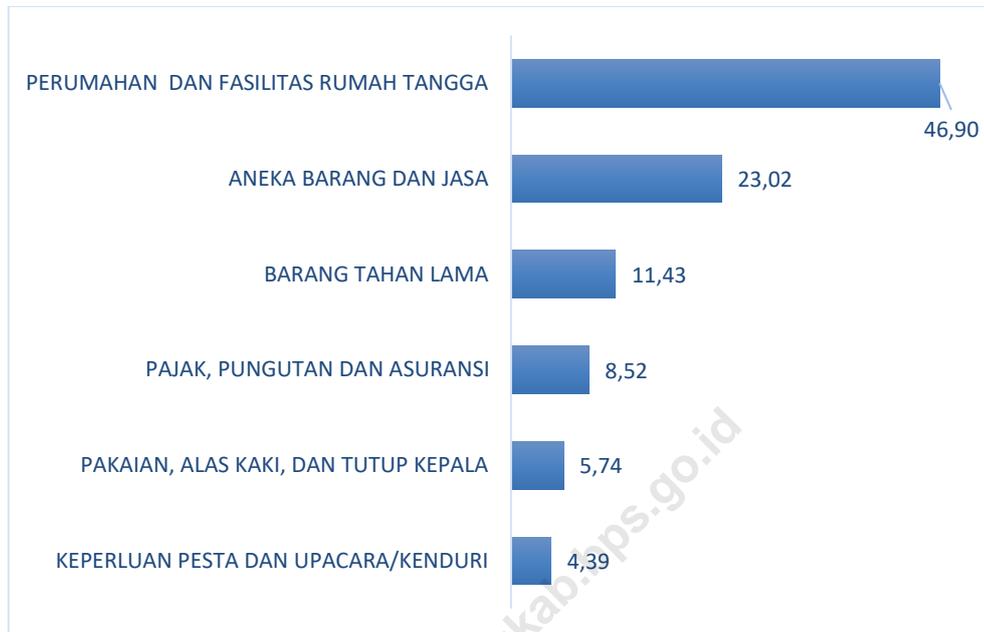
**Gambar 4.2.1. Pola Konsumsi Makanan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2023**

Pola konsumsi makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan pada Gambar 4.2.1 terlihat bahwa 5 kelompok komoditas makanan yang tertinggi adalah makanan dan minuman jadi (30,61 persen), rokok dan tembakau (14,29 persen), padi-padian (11,78 persen), sayur-sayuran (8,59 persen), dan buah-buahan (5,50 persen). Sedangkan kelompok komoditas lainnya yang terdiri dari daging (5,20 persen), telur dan susu (5,04 persen), bahan minuman (4,68 persen), kacang-kacangan (3,08 persen), minyak dan kelapa (2,90 persen), ikan/udang/cumi/kerang (2,82 persen), konsumsi lainnya (2,27 persen), bumbu-bumbuan (2,14 persen), dan umbi-umbian (1,09 persen).

#### 4.2.2 Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa termasuk biaya

pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk pakaian dan perlengkapannya, pengeluaran untuk barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi, dan pengeluaran untuk keperluan pesta.



Sumber : Susenas Maret 2023

**Gambar 4.2.2. Pola Konsumsi Non Makanan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2023**

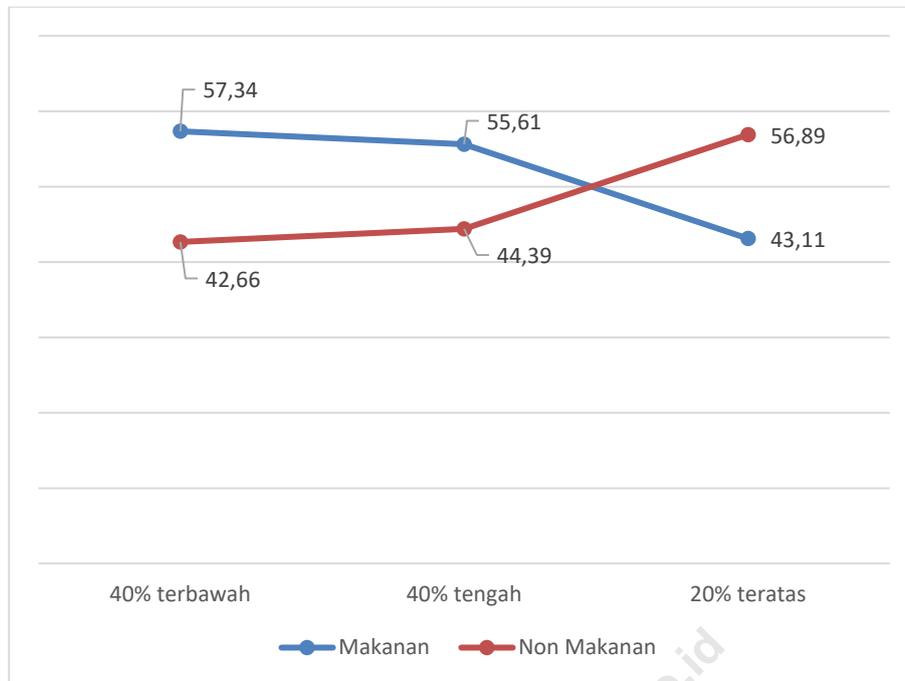
Pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 49,52 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar, yaitu 46,90 persen dari total konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga meliputi pengeluaran untuk perkiraan sewa rumah yang ditempati, atau nilai sewa/kontrak rumah yang ditempati beserta perbaikannya dan biaya untuk fasilitas listrik dan air, biaya konsumsi bahan bakar kendaraan dan perawatannya, biaya untuk bahan bakar memasak, perawatan rumah, dan konsumsi untuk komunikasi. Pengeluaran terbanyak kedua adalah untuk konsumsi aneka barang dan jasa sebesar 23,02 persen. Kelompok ini mencakup kebutuhan pribadi untuk perawatan tubuh dan pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, transportasi, rekreasi dan jasa lainnya. Sedangkan konsumsi barang tahan lama yang mencakup pembelian atau penambahan barang tahan lama, termasuk alat elektronik, peralatan rumah tangga seperti mebel, sapu, barang pecah belah, dll menempati posisi ketiga sebesar 11,43 persen. Sedangkan

sisanya untuk memenuhi kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi (8,52 persen), pakaian, alas kaki, dan tutup kepala (5,74 persen), dan keperluan pesta dan upacara/kenduri (4,39 persen).

#### **4.3 Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Pengelompokan penduduk berdasarkan pengeluaran dilakukan untuk melihat pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat tentu perlu menjadi bahan evaluasi belum meratanya hasil pendapatan di antara kelompok-kelompok penduduk. Bank Dunia membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran bawah, 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tengah, dan 20 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tertinggi.

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa penduduk di kelompok pengeluaran bawah masih mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk konsumsi makanan, yaitu sebesar 57,34 persen dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan paling kecil yaitu 42,66 persen. Sedangkan untuk kelompok tengah, komposisi pengeluaran makanan yaitu sebesar 55,61 persen dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar 44,39 persen. Pada kelompok penduduk 20 persen tinggi pengeluaran konsumsi untuk makanannya paling kecil yaitu sebanyak 43,11 persen dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan paling besar yaitu 56,89 persen. Hal ini mendukung teori semakin membaiknya tingkat perekonomian penduduk, proporsi konsumsi untuk kebutuhan non makanan akan semakin tinggi.



Sumber : Susenas Maret 2023

**Gambar 4.3. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran Penduduk Tahun 2023**

Dari tabel 4.3 dapat ditunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas mempunyai rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 2 276 400,-, nilai ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk kelompok 40 persen tengah yang sebesar Rp. 973 872,- dan 5 kali lipat rata-rata pengeluaran penduduk kelompok 40 persen bawah yang sebesar Rp. 495 709,-. Perbedaan yang besar dalam rata-rata pengeluaran penduduk tiap bulan memperlihatkan kesenjangan pengeluaran yang cukup tinggi. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi komposisi konsumsi tiap kelompok pengeluaran. Penduduk dengan kelompok pengeluaran yang tinggi, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding kelompok di bawahnya. Hal ini juga akan mempengaruhi pola konsumsi tiap kelompok.

Pola konsumsi makanan di setiap kelompok pengeluaran juga menunjukkan komposisi yang berbeda. Pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi menunjukkan nilai yang paling besar, yaitu sebesar Rp. 79 936,- untuk kelompok pengeluaran 40 persen bawah, Rp. 161 898,- untuk kelompok 40 persen tengah, dan Rp. 322 365,- untuk kelompok 20 persen atas. Meskipun urutan pengeluaran terbesarnya sama, yaitu makanan dan

minuman jadi, namun pola konsumsi pengeluaran makanan untuk setiap kelompok berbeda. Untuk kelompok 40 persen bawah, konsumsi tertinggi setelah makanan dan minuman jadi adalah padi-padian, sayur-sayuran, bahan minuman, dan daging. Untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah—yaitu makanan jadi, padi-padian, sayur-sayuran, buah-buahan dan telur susu. Sedangkan untuk 20 persen teratas yaitu makanan jadi, padi-padian, sayur-sayuran, buah-buahan dan daging

Pengeluaran non makanan juga mempunyai pola yang hampir sama di ketiga kelompok pengeluaran. Pengeluaran terbesar adalah untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa. Sementara urutan pengeluaran selanjutnya ada perbedaan untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan dua kelompok lainnya yaitu di urutan ketiga digunakan untuk membayar Pajak, Pungutan dan Asuransi. Sedangkan untuk dua kelompok pengeluaran lainnya di urutan ketiga adalah konsumsi untuk barang tahan lama.

**Tabel 4.3**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2023**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	48 157	64 785	84 179
Umbi-Umbian	3 242	6 757	8 796
Ikan	6 056	15 888	30 448
Daging	14 661	25 527	56 525
Telur dan Susu	13 658	26 811	51 755
Sayur-Sayuran	28 899	47 549	73 212
Kacang-Kacangan	12 005	15 631	25 910
Buah-Buahan	10 024	27 465	69 879
Minyak dan Kelapa	8 766	17 101	24 559
Bahan Minuman	16 394	25 700	39 113
Bumbu-Bumbuan	6 756	11 012	20 784
Bahan Makanan Lainnya	7 424	12 089	20 871
Makanan Minuman Jadi	79 936	161 898	322 365

Rokok dan Tembakau	28 248	83 391	152 928
<b>Total Makanan</b>	<b>284 229</b>	<b>541 604</b>	<b>981 324</b>
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	118 621	222 559	528 861
Aneka barang dan Jasa	46 593	93 148	314 931
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	11 356	28 670	68 213
Barang Tahan Lama	8 587	36 794	204 393
Pajak, Pungutan dan Asuransi	24 034	38 711	94 645
Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	2 290	12 386	84 033
<b>Total Bukan Makanan</b>	<b>211 480</b>	<b>432 269</b>	<b>1 295 077</b>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>495 709</b>	<b>973 872</b>	<b>2 276 400</b>

Sumber : Susenas Maret 2023

#### 4.4 Pola Konsumsi Kalori Penduduk

Kalori adalah satuan kandungan panas atau energi yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan tubuh agar dapat beraktifitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Semua bahan makanan mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Kebutuhan kalori masing-masing orang berbeda berdasarkan tingkat aktifitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2 100 kkal per orang per hari.

Total rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2023 masih dibawah angka kecukupan energi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu hanya sebesar 1 937,78 kkal. Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang kelompok penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 1 620,65 kkal, kelompok pengeluaran 40 persen tengah sebesar 2 028,81 kkal, dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas sebesar 2 390,70 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang sudah memenuhi rata-rata angka kecukupan energi sedangkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 40 persen tengah belum memenuhi rata-rata angka kecukupan energi.

**Tabel 4.4**  
**Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari menurut Kelompok Komoditas**  
**Makanan dan Kelompok Pengeluaran Penduduk (kkal) Tahun 2023**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Konsumsi Kalori
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	698,76	737,56	700,95	714,69
Umbi-Umbian	29,39	37,42	35,01	33,72
Ikan	13,80	23,16	31,50	21,08
Daging	47,58	80,09	128,39	76,74
Telur dan Susu	32,78	52,00	72,46	48,40
Sayur-Sayuran	38,35	45,79	51,66	43,99
Kacang-Kacangan	58,57	66,93	90,55	68,31
Buah-Buahan	37,69	57,35	72,41	52,49
Minyak dan Kelapa	209,66	278,94	328,58	261,13
Bahan Minuman	100,09	136,26	197,16	133,97
Bumbu-Bumbuan	6,80	9,31	13,43	9,13
Bahan Makanan Lainnya	40,95	56,52	72,27	53,44
Makanan Minuman Jadi	306,22	447,49	596,33	420,71
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Makanan</b>	<b>1.620,65</b>	<b>2.028,81</b>	<b>2.390,70</b>	<b>1.937,78</b>

Sumber : Susenas Maret 2023

Penyumbang kalori terbesar di tiap kelompok pengeluaran makanan sama di tiap kelompoknya, yaitu konsumsi padi-padian dilanjutkan dengan kalori yang diperoleh dari minyak dan kelapa serta makanan dan minuman jadi

#### 4.5 Pola Konsumsi Protein Penduduk

Protein merupakan salah satu nutrisi yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di dalam tubuh, protein dipecah menjadi asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan enzim, hormon, *neurotransmitter* (senyawa kimia dalam otak), dan antibodi. Tanpa asupan yang memadai tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kandungan protein ada dalam tiap jenis makanan, meskipun besarnya

persentase kandungan dalam tiap makanan/bahan makanan berbeda-beda. Kandungan protein yang tinggi terdapat dalam ikan dan biota laut lainnya, daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Sedangkan bahan pangan lainnya mempunyai kandungan protein yang lebih rendah.

**Tabel 4.5**  
**Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram) Tahun 2023**

Kelompok Komoditas (1)	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Konsumsi Protein (5)
	40 persen terbawah (2)	40 persen tengah (3)	20 persen teratas (4)	
Padi-Padian	16,48	17,47	16,64	16,91
Umbi-Umbian	0,32	0,47	0,43	0,40
Ikan	2,11	3,76	5,25	3,40
Daging	2,90	4,86	7,92	4,69
Telur dan Susu	1,86	2,95	4,13	2,75
Sayur-Sayuran	2,47	2,82	3,10	2,73
Kacang-Kacangan	6,03	6,89	9,25	7,02
Buah-Buahan	0,35	0,59	0,80	0,54
Minyak dan Kelapa	0,27	0,29	0,40	0,31
Bahan Minuman	1,27	1,33	2,00	1,44
Bumbu-Bumbuan	0,26	0,36	0,49	0,35
Bahan Makanan Lainnya	0,77	1,02	1,32	0,98
Makanan Minuman Jadi	8,89	14,13	21,45	13,50
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Makanan</b>	<b>43,99</b>	<b>56,93</b>	<b>73,18</b>	<b>55,00</b>

Sumber : Susenas Maret 2023

Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari

penduduk Kabupaten Magelang adalah 55 gram. Angka tersebut masih dibawah AKG yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata konsumsi protein per kapita untuk penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 43,99 gram, untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah sebesar 56,91 gram, sedangkan untuk kelompok pengeluaran 20 persen atas sebesar 73,18 gram. Dari hasil tersebut dapat dilihat jika asupan protein ideal penduduk Kabupaten Magelang hanya terpenuhi di penduduk kelompok pengeluaran atas.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa kelompok pengeluaran 40 persen terbawah masih jauh di di bawah rata-rata angka kecukupan energi dan protein. AKG adalah kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. Untuk memenuhi AKG, diperlukan untuk mengonsumsi makanan gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktifitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.

## **BAB V PENUTUP**

Program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu aspek penting guna mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran dan profil kemiskinan yang tepat merupakan instrumen tangguh bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, di samping data seberapa besar jumlah dan persentase penduduk miskin, maka diperlukan pula untuk diketahui bagaimana kondisi kehidupan mereka melalui data karakteristik penduduk miskin.

Selain itu, pembangunan bukan hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk:

Publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2023” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 sebanyak 144,49 ribu orang (10,96 persen), turun sekitar 840 orang dari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 145,33 ribu jiwa (11,09 persen).
2. Garis kemiskinan Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Magelang meningkat sebesar Rp 33 632,- atau naik 8,91 persen, yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 377 497,- per kapita per bulan menjadi Rp. 411 129,- per kapita per bulan pada tahun 2023.
3. Pada Tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan naik 0,07 poin sedangkan Indeks keparahan kemiskinan tetap atau tidak ada kenaikan yaitu 0,41 poin.

4. Dari segi Pendidikan, lebih dari separuh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang berpendidikan Tamat SD/SMP. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia 15 – 24 tahun yaitu 100 persen, artinya semua penduduk miskin usia 15-24 tahun sudah bisa membaca huruf latin dan huruf lainnya
5. Dari segi ketenagakerjaan, mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dan bekerja di sektor informal.
6. Terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang, dimana konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Pola naiknya pengeluaran untuk makanan mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun.
7. Pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi, rokok dan tembakau, dan padi-padian sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan aneka barang dan jasa, dan pengeluaran untuk barang tahan lama.
8. Pola konsumsi penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan selisih rata-rata pengeluaran yang sangat jauh dari tiap kelompoknya. Kelompok penduduk dengan pengeluaran atas mempunyai rata-rata pengeluaran 2 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok 40 persen tengah dan 5 kali lipat dibanding rata-rata pengeluaran kelompok 40 persen bawah.
9. Total rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2023 masih dibawah angka kecukupan energi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu hanya sebesar 1 937,78 kkal. Berdasarkan kelompok keluaran, hanya kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang sudah mencukupi AKG.
10. Asupan protein sebesar 57 gram per orang per hari di Kabupaten Magelang hanya terpenuhi di kelompok pengeluaran 20 persen atas.

# ST 2023

## SENSUS PERTANIAN

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511  
Telp./Fax. (0293) 788143. E-Mail : [bps3308@bps.go.id](mailto:bps3308@bps.go.id)  
Homepage: <https://magelangkab.bps.go.id/>

ISSN 2776-7116

